

Implementation of The Family Planning Village Program in Grogol Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency [Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo]

Siti Qonita Faiza¹⁾, Isnaini Rodiyah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the Family Planning Village program and to determine the inhibiting factors in the Implementation of the Family Planning Village Program in Grogol Village. Using qualitative methods with a descriptive approach. Data collection is done by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis uses three components, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that each indicator in theory is (1) communication in the form of socialization invitations at the village hall and briefing on family planning villages; (2) human resources with a large number of members, facilities in the form of activity sites and additional training books for cadres; (3) the bureaucratic structure, namely there is an SOP which uses the KB Village book as a guideline for the procedures for implementing KB Village; (4) According to the community, the officers' disposition/response was good enough in carrying out their duties in carrying out the KB Village program. Implementation of Family Planning Villages based on Law of the Republic of Indonesia Number 52 of 2009, namely regarding prosperous families*

Keywords – *Family Planning Village, Quality of Community Life, Republic of Indonesia Law No. 52 of 2009 and Village Program in Grogol Village, Tulang District, Sidoarjo Regency.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Kampung KB serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Grogol. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator didalam teori yaitu (1) komunikasi yang berupa undangan sosialisasi di balai desa dan pembekalan mengenai kampung keluarga berencana; (2) sumber daya manusia dengan jumlah anggota yang cukup banyak, fasilitas yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader; (3) struktur birokrasi yaitu terdapat SOP yang mana menggunakan buku Kampung KB sebagai pedoman prosedur pelaksanaan Kampung KB; (4) disposisi/respon petugas menurut masyarakat para petugas sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan program Kampung KB. Implementasi Kampung Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, yaitu tentang keluarga sejahtera..*

Kata Kunci – *Kampung Keluarga Berencana, Kualitas Hidup Masyarakat, Undang- Undang RI No.52 tahun 2009 dan Program Kampung di Desa Grogol Kecamatan Tulang Kabupaten Sidoarjo*

I. PENDAHULUAN

Kampung Keluarga Berencana adalah sebuah wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Konsep Kampung Keluarga Berencana adalah miniatur pelaksanaan program Keluarga Berencana secara terpadu dan komprehensif di tingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW). Konsep Kampung Keluarga Berencana merupakan konsep terpadu program Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kampung Keluarga Berencana didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program Keluarga Berencana. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri.

Kampung Keluarga Berencana diharapkan menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan dalam mewujudkan Agenda Prioritas 5 (lima) dari 9 agenda prioritas pemerintahan periode 2020-2021 yakni "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Secara umum, Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka memwujudkan keluarga kecil berkualitas.

Secara khusus, kampung Keluarga Berencana ini dibentuk selain meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non Kementerian dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait, juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan adalah salah satunya dengan pembentukan Kampung KB yang saat ini menjadi prioritas pemerintah dimana dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kampung KB bukan hanya untuk masalah kependudukan tapi juga dirancang melalui Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur dari jumlah pengeluaran rumah tangga, apabila jumlah pengeluaran pokok rumah tangga sebanding atau lebih rendah dari pada pengeluaran yang bukan pokok rumah tangga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan [1].

Beberapa peneliti terdahulu telah menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertama, Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pada Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang [2]. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang berjalan baik dan memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat baik dalam aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Utamanya adalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Adanya Kampung KB memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi keluarga. Dalam hal ini keberadaan Kampung KB di Kelurahan Dadapsari telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah dan juga elemen-elemen masyarakat menjadi faktor pendorong yang sangat penting bagi berlangsungnya program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari. Pemerintah melalui dukungannya secara formil dan juga elemen-elemen masyarakat yang secara praktis bahu membahu demi keberlangsungan program Kampung KB ini. Sementara itu faktor penghambat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari meliputi dua faktor utama yakni kesadaran masyarakat yang rendah, serta kurangnya tenaga penyuluh yang membuat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari berjalan kurang maksimal.

Kedua, Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) Di Desa Telaga Waru Kec. Peringgabaya Kab.Lombok Timur [3]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana di desa Telaga Waru variabel komunikasi, PLKB sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengikuti aturan Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana dan untuk komunikasi sendiri pemerintah dan PLKB sudah mensosialisasikan program keluarga berencana ke masyarakat desa Telaga Waru ke setiap dusun masing-masing secara langsung dengan sangat baik kepada masyarakat. Selanjutnya untuk variabel sumber daya pemerintah kabupaten Lombok Timur sudah menggelontorkan dana untuk menunjang program KB. Walaupun masih kurang memadai dalam pelaksanaannya SDM yang tersedia sudah memenuhi klasifikasi dan sudah mahir dalam melaksanakan program KB. Sedangkan faktor pendukung adalah semangat dari petugas dan kader dalam melaksanakan program KB dan masyarakat ikut berpartisipasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran dan fasilitas sebagai sarana penunjang program KB di desa Telaga Waru.

Ketiga, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur (I Gede Dodie Permana Putra). Hasil penelitiannya adalah secara pemahaman, Pelaksana Implementasi, mengetahui secara umum mengenai Keluarga Berencana ini. Namun dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program masih menjadi pertanyaan, dan ketakutan pasangan usia subur dalam ber-KB. Sedangkan sikap PLKB yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi program keluarga berencana.

Keberhasilan keluarga berencana ini juga menjadi alternatif untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Salah satu Desa yang menjadi kampung KB adalah Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Desa Grogol mempunyai wilayah seluas 412,809 Ha dengan jumlah penduduk \pm 6.409 jiwa dan Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 1.129 jiwa. Mayoritas pekerjaan warga Desa Grogol adalah sebagai buruh pabrik dan petani.

Gambar 1 Statistik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur



Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gresik 2021

Sejak adanya Kampung KB memberikan dampak yang baik pada desa mulai dari kesehatan masyarakat yang terjamin karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas hidup masyarakat juga memiliki peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya serta yang paling penting adalah fungsi Keluarga Berencana disini dapat terlaksana sebagai mestinya. Terbinanya pasangan usia subur paritas rendah (pustumpar) dan ibu paska melahirkan, semua Ibu hamil dan menyusui terlayani kesehatan KB, semua keluarga dengan anak usia 0-6 tahun terlayani BKB.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi program kampung KB diantaranya adalah: 1) masalah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu masih kurangnya kepedulian masyarakat dengan adanya program Kampung KB (Keluarga Berencana) yaitu dengan 2 anak cukup. 2) kurangnya pembinaan terhadap kader, sehingga dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat masih ada masyarakat yang belum mengerti apa yang disampaikan oleh kader Kampung Berencana desa Grogol. Tujuan serta manfaat adanya penelitian ini yaitun : 1) Meningkatkan pengetahuan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung Desa Grogol atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil; dan 3) Memberikan pengetahuan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pembinaan terhadap kader di Desa Grogol.

II. METODE

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat diolah dan dideskripsikan. Metode kualitatif ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder [4]. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari observasi dan wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses implementasi program Kampung KB yaitu Ketua Kampung KB sebagai narasumber informasi dan anggota sebagai narasumber terkait data-data di Kampung KBdesa Grogol. Sedangkan buku, jurnal, web resmi serta dokumen lain terkait Kampung KB desa Grogol merupakan sumber data sekunder yang didapat peneliti. Hasil wawancara dan observasi dapatdiuraikan dan dijelaskan secara jelas apabila menggunakan metode penelitian kualitatif [5].

Fokus penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan dan teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; 4) Struktur Birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat [6]. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap Komunikasi. Data kemudian dibahas dengan mengadaptasi model Miles dan Huberman agar bisa ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DiDESA GROGOL KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan adalah melaksanakan Undang-Undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kinerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan [7]. Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya [8].

B. TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT GEORGE C. EDWARDS III

Menurut George C. Edwards III terdapat empat indikator penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga akan menghindari adanya distorsi atas kebijakan ini. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuankelompok atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam tujuan yang sesungguhnya [9].

2. Sumber Daya

Sumber Daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh berbagai macam sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial. Sumber daya manusia merupakan kecukupan yang baik dengan kualitas maupun kuantitas pelaksana dapat melingkupi seluruh kelompok. Sumber daya finansial merupakan kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjadi keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan financial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemukan dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dalam guidelineprogram. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahapan-tahapan program secara konsisten. Sikap demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menunjukkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/ kebijakan [10].

4. Struktur birokrasi

Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana

sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas [11].

C. IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA GROGOL KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

Menurut George C. Edward III (Widodo, 2010:97) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi yang dibina di Kampung KB Desa Grogol adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Desa Grogol yang dibantu oleh kader Kampung KB memberikan arahan dan sosialisasi kepada para masyarakat dalam mengimplementasikan Kampung KB dengan berbagai program yang telah dicanangkan. 2) Kader Kampung KB desa Grogol memberikan arahan kepada semua masyarakat agar mengikuti Kampung KB dan menerangkan tentang manfaatnya; 3) Ketua Kampung KB memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten kepada pelaksana supaya dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan;

Gambar 3

Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Desa Grogol



D. SUMBER DAYA

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya terkait dengan kegunaan (usefulness), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan [12].

Sumber daya memiliki tiga sub indikator dalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana, diantaranya yaitu: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan juga sumber daya fasilitas. Adapun indikator sumber daya adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya staf yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan; 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan program Kampung KB; 3) Tersedianya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan; 4) Tersedianya waktu yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan [13]. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan program Kampung KB di desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kampung KB Desa Grogol
Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No.	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Nama
1.	Pembina	<u>Camat Tulangan</u> Didik Widoyoko
2.	Ketua	Oky Aspuji Pribadi
3.	Sekretaris	Halimatus Sa'diyah, S.Sos
4.	Bendahara	Khilmiatur Rokhilah
5.	Kelompok Kegiatan	
	Seksi Keagamaan	H. Mukhromin
	Seksi Sosial Budaya	Fitri Virdausi
	Seksi Cinta Kasih	Nur Pujiyanti
	Seksi Perlindungan	Faridah
	Seksi Reproduksi	Sumarni
	Seksi Sosialisasi	Seniwati
	Seksi Ekonomi	Astutik Ningsih
	Seksi Lingkungan	M. Suhartono

Sumber : Diolah dari pemerintah desa Tulangan (2022)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada sejumlah informan baik dari unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat dalam indikator mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran program Kampung KB di desa Grogol, dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up. Anggaran yang sudah disiapkan setiap tahunnya melalui program kegiatan yang disusun dari atas (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten), serta anggaran yang diajukan dari bawah yang dimulai dari penyusunan jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan anggarannya dari pengurus Kampung KB yang kemudian diajukan dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diajukan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten [14].

Sumber anggaran Program Kampung KB berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD Kabupaten, dan juga dari ADD. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa anggaran tersebut pada tingkat Kampung KB belum cukup memadai untuk dapat melaksanakan keseluruhan agenda kegiatan yang sudah disusun dan ditetapkan, sehingga dibuat langkah kebijakan dengan cara skala prioritas. Berikut anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk program Kampung KB di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2
Rancangan Anggaran Biaya Kampung KB desa Grogol

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Biaya	Keterangan
1.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Masyarakat			SK Kepala Desa Grogol
		• Jumlah kelompok kerja tim	Pokja 25 orang		
		• Sasaran kelompok kerja	Kadus Desa Grogol		
		• Jumlah Sasaran binaan	RT dan RW	600.000.000	
		• Operasional kelompok kerja	Pokja 25 orang	2.500.000.000	
		Jumlah		3..100.000.000	

Sumber : diolah dari pemerintah desa Tulangan
(2022)

Pada dimensi sumber-sumber kebijakan, indikator ketiga adalah tentang ketersediaan dan kecukupan fasilitas, untuk menggali informasi sedalam-dalamnya bagaimana ketersediaan dan kecukupan fasilitas/sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Program Kampung KB di desa Grogol. Disposisi atau sikap pelaksana. Pengertian disposisi menurut George C. Edwards III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. George C. Edwards III mengatakan bahwa:

“Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh para implementor yaitu PLKB dan juga kader di dalam kegiatan Kampung KB di desa Grogol bahwa dari pihak implementor sendiri menerima sangat baik dengan adanya program Kampung KB ini, menurut beliau dengan adanya Kampung KB ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat, dan jika program ini berhasil maka hal tersebut juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program Kampung KB ini.

Menurut masyarakat para petugas sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan program Kampung KB. Mereka sangat memahami program tersebut dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga mengerti kebutuhan masyarakat dan juga rajin melakukan kegiatan penyuluhan serta bersosialisasi dengan masyarakat. Intensitas petugas dalam melaksanakan kegiatan akhir-akhir ini terhambat dikarenakan covid-19 sehingga masyarakat Kampung KB yang ikut dalam melaksanakan suatu kegiatan ini dibatasi hanya ada beberapa orang saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut.

Struktur birokrasi Sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana/kader kampung KB mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik [15].Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Kampung KB di desa Grogol harus ada hal-hal sebagai berikut: a) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kampung KB desa Grogol; b) Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kampung KB desa Grogol.

Gambar 3**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Grogol**

Dalam pelaksanaan kerja digunakan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program. SOP (Standard Operational Procedures) digunakan sebagai acuan langkah-langkah atau tahapan dari tindakan yang akan diambil selama proses pelaksanaan dari suatu kegiatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SOP dari Kampung KB di Desa Grogol sudah cukup baik, SOP yang digunakan yaitu berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Standar dan sasaran kebijakan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan Pelaksanaan Kampung KB sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya SOP (Standard Operational Procedures) berupa buku petunjuk teknis Kampung KB serta pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan itu sendiri, (2) sumber daya manusia dan anggaran dalam Pelaksanaan Kampung KB sudah memadai, namun dari segi fasilitas belum memadai dikarenakan fasilitasnya belum ada hanya ada pembinaan yang dilakukan kepada implementor, (3) karakteristik Agen pelaksana struktur birokrasi pembagian dan wewenang serta karakter petugas Kampung KB dalam pelaksanaannya sudah cukup jelas dan baik hal ini dapat dilihat dari struktur birokrasinya yang jelas dan tugasnya yang memiliki karakteristik agen pelaksana sebuah kebijakan yang baik, (4) Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana Respon dan pemahaman implementor akan program Kampung KB cukup baik hal ini terlihat dari keinginan implementor untuk melakukan program KB ini dengan baik. Insentif implementor yang diberikan pun juga dapat dikatakan cukup. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode yang berbeda sehingga akan memberikan hasil yang lebih bervariasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Grogol, Kepala Kampung KB dan jajaran stafnya yang memberikan kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

REFERENSI

- [1] UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang Kesejahteraan Sosial.
- [2] Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama Idrus Nugroho, Bonifasius Efsiko and Galih Pradana. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya." 155-66
- [3] Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Prilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- [4] Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga
- [5] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [6] Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- [7] Nugroho, Dwijowijoto. 2003. Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- [8] Suparno. 2017. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang). Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya
- [9] Indrian, Ika. Sambiran, Sarah. Kumayas, Neni. 2018. Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Volome 1 No.1: 8 – 11
- [10] Restiyan, NLN. Yasa, IGWM. 2019. Efektifitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar. 8.7: 712-715
- [11] Peraturan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BKKBN. (2017)
- [12] Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- [13] A.G, Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. FISIP UI PRESS.
- [15] Mardiyono. 2017. Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK dan Terkait di Jawa Timur. (Studi di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan). Vol 2 No.1: 4

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.